

**PERMASALAHAN PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE  
2019-2022**

***PROBLEMS OF POLITICAL INSTITUTION INDONESIAN DEMOCRACY PARTY OF  
THE STRUGGLE (PDI-P) IN WEST SUMATRA PROVINCE 2019-2022 PERIOD***

Lailatul Khadri<sup>1</sup>, Andri Rusta<sup>2</sup>, Tengku Rika Valentina<sup>3</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
[lailatulkhadri@gmail.com](mailto:lailatulkhadri@gmail.com)

**ABSTRAK:** Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia pasca reformasi, membuat negara ini menjadi negara multipartai. Munculnya berbagai partai politik ini tentunya mengharuskan Indonesia lebih memperhatikan pelebagaan politik pada setiap partai politik yang ada, karena pelebagaan politik partai akan berpengaruh pada bagaimana pengelolaan terhadap internal maupun eksternal partai, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada keberlangsungan demokrasi negara di Indonesia. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang diresmikan pada tahun 1998, ini bukan waktu yang sebentar untuk partai ini dapat melebagaan dirinya dengan baik. Akan tetapi, 24 tahun berjalan, PDI Perjuangan di Sumatera Barat memiliki masalah yang sama dari tahun ke tahun, yaitu perolehan suara yang rendah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh pelebagaan politik yang belum berjalan secara maksimal dalam organisasi partai. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana permasalahan pada pelebagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Barat periode 2019-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, serta teknik pengumpulan data berupa data sekunder, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis datayang diperoleh, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Vicky Randal dan Lars Svasand yang melihat dari empat dimensi. Hasil dari penelitian ini, mendeskripsikan bahwa pelebagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum berjalan dengan baik di Sumatera Barat, karena masih terdapat masalah mengenai pendanaan, otoritas pemimpin, dan citra publik yang buruk.

**Kata kunci:** Pelebagaan politik, PDI Perjuangan, perolehan suara

**ABSTRACT:** Changes in the government system in Indonesia after the reformation have made this country a multi-party country. The emergence of these various political parties certainly requires Indonesia to pay more attention to the institutionalization of politics in each existing political party, because the institutionalization of party politics will affect how internal and external parties are managed, so this will also affect the sustainability of state democracy in Indonesia. PDI Perjuangan is one of the political parties that was inaugurated in 1998, this is not a short time for this party to institutionalize itself properly. However, 24 years running, PDI Perjuangan in West Sumatra has had the same problem from year to year, namely low vote acquisition. This is of course influenced by political institutionalization which has not run optimally in party organizations. therefore, the aim of this research is to analyze and describe how the problems in political institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle in West Sumatra for the 2019-2022 period. This study uses a qualitative research approach with the case study method, as well as data collection techniques in the form of secondary data, interviews and documentation. To analyze the data obtained, the researcher uses the theory put forward by Vicky Randal and Lars Svasand

*which looks at it from four dimensions. The results of this study describe that the political institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle has not gone well in West Sumatra, because there are still problems regarding funding, leadership authority, and bad public image.*

**Keywords: Political institutionalization, PDI Perjuangan, vote acquisition**

## A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan demokratisasi di Indonesia kehadiran partai politik menjadi salah satu yang sangat penting. Partai politik pada dasarnya adalah suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>1</sup> Dilihat dari partai politik yang memberikan kemudahan pada sistem demokrasi dalam menghasilkan pemimpin yang baik dan berintegritas melalui pelaksanaan pemilu dalam pemerintahan suatu negara. Partai politik di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, namun maraknya pendirian partai politik terlihat beberapa bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah partai politik Indonesia pasca-reformasi, yang menjadi cikal bakal dari perubahan besar dalam dunia perpolitikan Indonesia, perubahan yang terjadi dari sistem otoritarian ke sistem politik demokratis ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang Multi-partai.

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kelompok ini memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional (pemilu) dalam upaya melaksanakan programnya.<sup>2</sup> Dengan begitu partai politik sebagai wadah bagi individu atau kelompok untuk masuk dalam lingkup politik dengan fungsi sebagai penyambung antara pemerintah dan rakyatnya. Secara jelas keberadaan partai politik ini telah memberikan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Namun akhir-akhir ini partai politik dihadapkan dengan kondisi yang paradoksal, dimana dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi salah satu tolak ukur pelaksanaannya, namun dilain sisi kepercayaan publik terhadap partai politik terus menunjukkan penurunan. Demikian survei yang dilakukan beberapa tahun belakang memperlihatkan bahwa partai politik masih menjadi salah satu dari dua lembaga terbawah yang dipercayai publik. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 25-31 Januari 2021, yang melibatkan 1.200 responden dengan wawancara tatap muka, menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik, yaitu sebanyak

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridha Dalam Wessy Juni Saputri. 2021. Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang

<sup>2</sup> Meriam Budiardjo. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: *PT Gramedia Pustaka Utama*

71 persen responden menyatakan percaya kepada DPR dan 65 persen yang percaya kepada partai politik.<sup>3</sup>

Kondisi ini disebabkan oleh partai-partai politik yang belum mampu memerankan fungsinya dengan baik, maraknya kasus korupsi yang melibatkan kader partai, dan menurunnya kepedulian partai terhadap kepentingan rakyat. Padahal partai politik dan demokrasi merupakan hal yang saling berhubungan dan saling berkaitan erat. Demokrasi tanpa partai politik tidak akan dapat terlaksana dengan baik, begitupun sebaliknya. Bahkan kualitas demokrasi tergantung pada kualitas partai politiknya, kualitas suatu partai politik juga berhubungan kuat dengan proses pelebagaan. Dalam hal tersebut, upaya untuk meninjau proses pelebagaan partai politik adalah bagian dari upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas.<sup>4</sup>

Pelebagaan partai politik merupakan proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya, sehingga partai menjadi lebih dari sekedar organisasi (the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behaviour and of attitude or culture). Dari pelebagaan politik dapat dianalisis model dan ciri khas dari masing-masing partai politik. Menurut Randall dan Lars di dalam teori pelebagaan partai politik, terdapat empat aspek yang menentukan bagaimana sebuah partai politik dapat dilihat dan dianalisis pelebagaan politiknya, yaitu: 1) dimensi kesisteman (systemness), 2) dimensi identitas nilai (value infusion), 3) dimensi otonomi dalam pengambilan keputusan (decisional autonomy), 4) dimensi pengetahuan atau citra publik (reification).<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dikatakan bahwa partai politik yang terlebaga dengan baik akan mampu menang dalam pemilu, maka peneliti ingin melihat fenomena bagaimana empat aspek pelebagaan politik ini mempengaruhi tingkat eksistensi sebuah partai politik dalam memenangkan pemilu. Sehingga fokus penelitian ini akan melihat bagaimana pelebagaan politik PDI-Perjuangan di Sumatera Barat periode 2019-2022. Karena dilihat bahwa PDI-Perjuangan dalam empat kali pelaksanaan pemilu di Sumatera Barat, masih belum mampu untuk mengambil simpati masyarakat Sumatera Barat dalam upaya memenangkan pemilu di wilayah ini.

Berdasarkan hal tersebut tentu saja terdapat masalah-masalah dalam pelebagaan politik partai ini yang mempengaruhi elektabilitasnya di Sumatera Barat, baik dilihat dari ideologi pembentukan partai hingga kemampuan partai dalam mengorganisasikan partainya pada wilayah ini. Kemampuan partai politik dalam mengambil simpati masyarakat serta menciptakan citra partai yang baik dimata publik sangat mempengaruhi keberhasilan partai

---

<sup>3</sup> Tempo.co, 2022. Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit. <https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit>. (diakses pada 21 Maret 2022)

<sup>4</sup> Randall Dan Lars Dalam Nanang Suryani, Dkk. 2020. Pelebagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 5, No. 1, P-Issn 2443-1591

<sup>5</sup> Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). "Party Institutionalisation in New Democracies." *Jurnal Party Politics*, Vol 8 (1) 5-29

dalam pemilu. Namun, meskipun partai PDI-Perjuangan sangat eksis di pulau Jawa dan wilayah lainnya, PDI-Perjuangan nyatanya masih belum mampu untuk mendapatkan simpati di tingkat pusat dari masyarakat Sumatera Barat hingga saat ini. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana permasalahan pada pelembagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2022?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi Kasus ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Metode ini akan membantu peneliti memahami secara mendalam mengenai permasalahan pelembagaan politik PDI-Perjuangan di Sumatera Barat periode 2019-2022.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dimensi Kesisteman (systemness)**

Randal dan Lars menyatakan bahwa dimensi kesisteman merupakan ukuran utama dari sebuah pelembagaan politik, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan berdasarkan aturan, persyaratan, serta prosedur dan mekanisme yang telah disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam AD/ART partai secara komprehensif. Derajat kesisteman suatu partai politik dilihat dari asal-usul partai politik, kepemimpinan dalam partai politik, asal sumber daya partai, peran faksi-faksi dalam partai, serta bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota maupun simpatisan. PDI Perjuangan lahir melalui proses yang panjang dengan berbagai keadaan dan permasalahan yang dihadapi, lahir dari perjuangan dan usaha perebutan yang terjadi antara dua kubu dalam internal PDI dan juga pemerintah. PDI Perjuangan lahir pada tahun 1973 yang dilatarbelakangi oleh adanya fusi dari lima partai politik, yaitu PNI, Parkindo, Partai Murba, PKRI, dan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).

Jika dilihat dari perspektif peneliti, karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas beragama islam, pemilih di Sumatera Barat memiliki tipe pemilih yang cenderung melihat pada asal-usul, kinerja, penampilan, dan yang paling utama adalah agama. Asal-usul PDI Perjuangan menjadi salah satu faktor yang menentukan pilihan masyarakat Sumatera Barat akan Partai ini, disisi lain PDI Perjuangan memiliki fungsi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART partai ini, pada bagian ketiga tentang Fungsi Partai pada pasal 9 pada poin d menyatakan bahwa, “PDI Perjuangan berfungsi untuk menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintah negara.” Namun apa yang terjadi dilapangan sangat berbeda dari apa yang tercantum dalam AD/ART PDI Perjuangan. Menariknya, PDI Perjuangan yang merupakan partai penguasa dalam dua periode ini seringkali dinilai membuat kebijakan yang

selalu bertentangan dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Hal ini membuat masyarakat Sumatera Barat tidak merasa terwakilkan oleh partai ini.

Selain itu, Peran ketua umum serta pengurus partai di tingkat pusat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan PDI Perjuangan di Sumatera Barat. Hal ini membuat PDI Perjuangan di tingkat daerah hanya menjalankan demokrasi semu. Megawati selaku ketua umum beserta kalangan elit di tingkat pusat merupakan kalangan yang sangat berkuasa di PDI Perjuangan. Hal ini terlihat dari sangat kuatnya pengaruh rekomendasi tingkat pusat dalam pengambilan keputusan di daerah, contohnya seperti pemilihan calon kepala daerah yang pada akhirnya keputusan diambil oleh DPP.

Partai politik dengan pelembagan politik yang baik, juga dinilai dari bagaimana partai menjalin serta mempertahankan hubungannya dengan anggota maupun pihak lainnya. Dengan adanya kader-kader yang duduk di legislatif, PDI Perjuangan Sumatera Barat selalu menjaga komunikasi baik dengan internal maupun eksternal partai. komunikasi dilakukan setaip kali masa reses dengan mendatangi masyarakat dan simpatisan, sedangkan dengan kader-kader dan pengurus partai komunikasi dilakukan melalui rapat konsolidasi yang biasanya dilakukan pada saat akan dilaksanakannya pemilu.

Pelembagaan politik PDI Perjuangan yang dilihat dari dimensi kesisteman dapat dinilai berada pada tingkatan sedang. Sebab, fungsi partai yang dimiliki oleh PDI Perjuangan sebagai partai yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat, nyatanya seringkali membuat kebijakan yang bertentangan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga terjadinya berbagai tindakan dari masyarakat dalam menanggapi hal tersebut. Selanjutnya peran dominan yang dimainkan oleh pengurus pusat terhadap partai di tingkat daerah, memberikan gambaran bahwa partai belum sepenuhnya melembagakan diri dengan baik.

## **2. Dimensi Identitas Nilai (*Value Infusion*)**

Identitas nilai merujuk pada pertanyaan apakah suatu partai politik memiliki aspek gerakan sosial yang didukung oleh kelompok tertentu, seperti kelompok petani, buruh, kelompok etnik, kelompok agama, maupun kelompok masyarakat tertentu. Dimensi identitas nilai juga dipengaruhi oleh klientalisme dalam hubungan antara anggota dan partai, yaitu apakah hubungan anggota dan partai bersifat instrumental atau bersifat ideologis. Di Sumatera Barat PDI Perjuangan memiliki basis sosial pendukung berdasarkan pada kelompok tertentu yang memiliki latar belakang etnis dan agama tertentu. Sebagaimana yang diketahui bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang berbasis nasionalisme, yang mana masyarakat Sumatera Barat menilai bahwa partai ini peduli akan populisme namun mereka abai akan kepentingan umat muslim. Hal ini menyebabkan PDI Perjuangan di Sumatera Barat hanya mendapatkan sosial pendukung dari masyarakat-masyarakat minoritas, yaitu masyarakat yang berada di daerah Dhamasraya, Pasaman Barat, Pesisir Selatan dan Mentawai. Ini berarti dukungan yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok tertentu yang ada di daerah-daerah heterogen yang disebutkan, tidak memberikan dukungannya berdasarkan pada orientasi politik yang dimiliki sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan, melainkan adanya hal-hal lain yang mampu mempengaruhi

pilihan mereka terhadap partai ini. Berdasarkan hal tersebut, apat dilihat bahwa pelebagaan politik PDI Perjuangan berada di tingkatan sedang. Pelebagaan politik yang baik dilihat dari identitas nilai, apabila partai politik memiliki basis sosial pendukung yang jelas, maka partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dengan baik, namun tidak dapat hanya dilihat dari pendukung PDI Perjuangan di Sumatera Barat jelas berada di beberapa daerah tersebut, namun PDI Perjuangan basis sosial pendukung yang minim di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh kelembagaan politik PDI Perjuangan yang lemah sehingga penanam identitas partai ini di Sumatera Barat tidak terlihat di Sumatera Barat.

### **3. Dimensi Otonomi Pengambilan Keputusan (*Decisional Autonomy*)**

Dimensi otonomi pengambilan keputusan dalam pengorganisasian partai politik, dilihat dari bagaimana hubungan partai dengan aktor diluar partai, baik dengan pemegang otoritas, dengan pemegang sumber dana politik maupun dengan dukungan massa dalam hal pembuatan keputusan. Apakah partai politik bergantung pada aktor-aktor diluar partai atau bahkan mereka bersifat independen (saling bergantung). Suatu partai politik dengan tingkat otonomi yang kuat, adalah partai yang dapat mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun yang berasal dari luar partai. Masalah keuangan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan tidak jauh berbeda dengan partai-partai lainnya, karena sumber pendanaan partai yang lebih mengandalkan pada iuran anggota sangat sulit untuk dipercaya. Hal ini karena iuran anggota yang dibayarkan secara sukarela menandakan bahwa tidak adanya aturan operasional yang mengatur tentang hal tersebut, serta iuran anggota tidak diminta secara rutin setiap tahunnya, sehingga tidak memungkinkan bahwa partai politik akan berdiri hanya dengan iuran anggota.

Selanjutnya, otonomi pengambilan keputusan dapat dilihat dari sudut pandang hubungan partai dengan pemegang otoritas. Dalam hal pengambilan keputusan, PDI Perjuangan di tingkat daerah akan selalu mengkonsultasikan keputusan politiknya dengan pengurus partai di tingkat pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi partai, yang mana keputusan ketua umum merupakan keputusan mutlak yang tidak bisa untuk diganggu gugat. PDI Perjuangan Sumatera Barat memiliki sistem pelebagaan politik di tingkat sedang. Hal ini dikarenakan oleh, sumber dana dari PDI Perjuangan yang masih sangat mengandalkan iuran dari kader partai dan sumber-sumber dana yang berasal dari sumbangan (hibah) aktor-aktor diluar partai, sehingga hal tersebut akan dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam internal partai. Selanjutnya, kuatnya peran ketua umum dalam proses pengambilan keputusan partai, meskipun partai di tingkat daerah telah memiliki keputusan, tetap saja DPD PDI Perjuangan ini akan melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. Tidak dipungkiri bahwa DPP harus mengetahui setiap keputusan politik yang di ambil dalam tingkat daerah, namun pengambilan keputusan dalam partai-partai lama seperti PDI Perjuangan cenderung berpusat pada keputusan ketua umum.

### **4. Dimensi Citra Publik (*Reification*)**

Dimensi ini merujuk pada citra positif dimata publik yang dimiliki oleh partai politik sehingga mampu mempertahankan loyalitas pendukungnya. Citra publik berkaitan dengan pertanyaan apakah keberadaan partai ini telah tertanam dalam imajinasi masyarakat, sehingga hal ini berkaitan dengan setiap kegiatan, platform serta arah kebijakan yang di ambil oleh suatu partai politik. PDI Perjuangan terkenal sebagai partai dengan masalah yang sama dari pemilu ke pemilu di Sumatera Barat, ini terbukti dari perolehan suara yang diperoleh PDI Perjuangan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Citra yang dimiliki PDI Perjuangan di Sumatera Barat terbilang cukup buruk, yang berawal dari isu bahwa partai ini merupakan titisan dari PKI.

Selain itu, Kekecewaan masyarakat Sumatera Barat akan peristiwa masa lampau, nyatanya masih berimplikasi pada pandangan Sumatera Barat terhadap PDI Perjuangan hingga saat ini. Peristiwa yang menyisihkan luka dalam di hati masyarakat Sumatera Barat ini terjadi pada saat adanya penumpasan PRRI dan peristiwa PKI pada saat pemerintahan Soekarno. Sehingga PDI Perjuangan yang merupakan partai yang merepresentasikan Soekarno ini tidak mendapat respon baik dari masyarakat Sumatera Barat. Isu-isu mengenai penyebab rasa kecewa itu masih ada dipercayai oleh PDI Perjuangan sebagai upaya dari partai lawan untuk menjatuhkan PDI Perjuangan di Sumatera Barat. Dari sudut pandang peneliti, citra PDI Perjuangan yang terlanjur terpuruk di Sumatera Barat ini, bukanlah hasil dari politik hitam yang dilakukan oleh pihak-pihak lawan, melainkan citra tersebut lahir dari dalam internal partai, bahkan citra buruk pada partai tersebut ditimbulkan oleh adanya tindakan-tindakan ataupun aktivitas-aktivitas dari pengurus maupun kader partai yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Sumatera Barat.

#### **D. KESIMPULAN**

Melihat dari keseluruhannya pelebagaan PDI Perjuangan di Sumatera Barat periode 2019-2022 ini, memiliki baik kelebihan maupun kekurangan dalam setiap dimensi pelebagaan politik partai. Dari penjelasan yang telah peneliti jelaskan melalui data sekunder dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik PDI Perjuangan belum terlebaga dengan baik, jika dilihat dari empat aspek yang dikemukakan oleh Randal dan Lars dalam melihat pelebagaan politik suatu partai.

Pertama, dimensi kesisteman. Pada dimensi ini Randal dan Lars lebih berfokus pada pengelolaan internal partai, yang mana melihat dari aspek asal-usul partai, bagaimana proses rekrutmen dalam partai, pelaksanaan tujuan dan fungsi partai, hingga cara partai dalam mempertahankan hubungan dengan anggota maupun simpatisan. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa pelebagaan politik PDI Perjuangan di Sumatera Barat berada di tingkat sedang, peneliti melihat bahwa elektabilitas PDI Perjuangan di Sumatera Barat masih dipengaruhi oleh asal-usul serta cara partai dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya baik ditingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan belum mampu beradaptasi dan memahami keinginan masyarakat Sumatera Barat. Namun disisi lain, cara partai dalam menjalin serta mempertahankan hubungan dengan anggota dan simpatisan sudah berjalan dengan baik. PDI Perjuangan selalu menjaga komunikasi antara satu dengan yang lainnya, sebagai contoh yang dapat dilihat adalah pelaksanaan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang telah terjadwalkan dengan baik dan tertulis dalam AD/ART PDI Perjuangan. Namun disisi lain, cara partai dalam menjalin serta

mempertahankan hubungan dengan anggota dan simpatisan sudah berjalan dengan baik. PDI Perjuangan selalu menjaga komunikasi antara satu dengan yang lainnya, sebagai contoh yang dapat dilihat adalah pelaksanaan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang telah terjadwalkan dengan baik dan tertulis dalam AD/ART PDI Perjuangan.

Kedua, dimensi identitas nilai, yang melihat pada bagaimana basis sosial pendukung yang dimiliki oleh suatu partai politik. Meski perolehan suara yang diperoleh PDI Perjuangan di Sumatera Barat terbilang rendah dari pemilu ke pemilu, namun partai ini memiliki pendukung yang loyal di beberapa daerah di Sumatera Barat. Randal dan Lars menyatakan bahwa suatu partai politik dapat dikatakan terlembaga dengan baik, apabila suatu partai politik telah memiliki basis sosial pendukung yang jelas. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pelebagaan politik PDI Perjuangan di Sumatera Barat di lihat dari identitas nilai sudah baik.

Ketiga, dimensi otonomi pengambilan keputusan, berfokus pada bagaimana sumber pendanaan suatu partai politik, hubungan partai dengan aktor-aktor diluar partai serta melihat hubungan partai dengan pemegang otoritas tertinggi dalam partai. Peneliti menilai PDI Perjuangan di Sumatera Barat memiliki masalah pada keuangan partai, partai ini hanya mengandalkan uang yang berasal dari iuran anggota yang dibayarkan secara sukarela, selanjutnya otonomi pengambilan keputusan melihat pada bagaimana hubungan partai dengan pemegang otoritas tertinggi dalam partai, PDI Perjuangan Sumatera Barat masih terpusat pada keputusan yang dikeluarkan oleh ketua umum, dimana PDI Perjuangan tingkat daerah ini tidak memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan untuk jalannya partai di daerah mereka sendiri.

Keempat, dimensi citra publik, PDI Perjuangan di Sumatera Barat memiliki citra yang kurang baik, bahwasanya PDI Perjuangan mendapatkan pelabelan sebagai PKI, partai kristen dan lainnya. Dilain sisi, sikap arogan pemimpin maupun kader PDI Perjuangan di tingkat pusat seringkali dinilai tidak sesuai dengan kultur dan keinginan masyarakat Sumatera Barat. Oleh sebabnya, peneliti menilai bahwa pelebagaan politik PDI Perjuangan di Sumatera Barat berdasarkan dimensi citra publik masih rendah, karena belum mampu beradaptasi dengan kultur masyarakat Sumatera Barat, sehingga hal-hal yang mampu menarik simpati masyarakat Sumatera Barat belum dapat dipahami oleh partai ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ridha Dalam Wessy Juni Saputri. 2021. Pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang
- Meriam Budiardjo. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: *PT Gramedia Pustaka Utama*
- Tempo.co, 2022. Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit. <https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit>. (diakses pada 21 Maret 2022)
- Randall Dan Lars Dalam Nanang Suryani, Dkk. 2020. Pelebagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 5, No. 1, P-Issn 2443-1591
- Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). "Party Institutionalisation in New Democracies." *Jurnal Party Politics*, Vol 8 (1) 5-29